SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/4/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/74/Sekre/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Usulan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/74/Sekre/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.melaksanakan...

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

g.memungut...

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang meliputi :
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

c.menerima ...

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan;dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

f.Bendahara...

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/267/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Keputusan Bupati Nomor 954/299/BKD-2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Keputusan Bupati Nomor 954/370/BKD-2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Keputusan Bupati Nomor 954/103/BKD-2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

f. Keputusan Bupati Nomor 954/220/BKD-2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

g. Keputusan Bupati Nomor 954/377/BKD-2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;dan

h.Keputusan ...

h. Keputusan Bupati Nomor 954/499/BKD-2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Nomor 954/106/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

dicabut dan digunakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/ 4/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RISWANDI, S.Pd, M.Pd 19660515 199003 1 009	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran
2.	LUTHFI, S.Pd 19690904 199109 1 001	Kepala Bidang Pembinaan SD	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SD
3.	EFRI DEDY, S.Pd, MM 19720423 200604 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan
4.	DEVIRA PURNAMA, SE 19750525 200701 2 014	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP
5.	AZIZAH, A.Md 19850114 202012 2 001	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
6.	FEBRIS JULINTA, A.Md 19830201 201001 2 025	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SD
7.	Dra. ERNITA, MM 19670609 199103 2 006	Analis Peserta Didik	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMP
8.	ADNI PABRI, SAP 19771221 200701 1 005	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Ketenagaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 5 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/51/Sekretariat-2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan TA 2023; dan
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/43/Sekretariat-2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

b.menerima ...

b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang selaku KPA meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan
i. kepala unit pelaksana teknis melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD Puskesmas.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas:
   a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
   b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
   c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
   d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
   f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah; dan
   g. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f termasuk untuk bendahara penerimaan pembantu untuk BLUD Puskesmas.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik; dan
   i. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h termasuk untuk bendahara pengeluaran pembantu untuk BLUD Puskesmas.

3. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;

d.menerima...

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman teknis lainnya.

KEENAM : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;
c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.
d. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/147/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/316/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/147/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan; dan

c. Keputusan Bupati Nomor 954/442/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/147/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 954/5/BPKD-2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Yesrita Zedrianis, M.Kes 19650906 199903 2 001	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran
2.	Veri Winora, ST 19760808 200604 1 007	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	Dr. Susi Julianti 19710719 200312 2 001	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat
4.	Dr. Eva Darmasari, M.Biomed 19720904 200212 2 001	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.	Purwanto, SP.MPH 19700604 199103 1 005	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan
6.	Boy Antoni Putra, S.Kep 19800217 200212 1 004	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Sri Mega Rakhmayanti, SE 19830102 201001 2 029	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
8.	Salwa Afdal, A.Md 19961119 202012 2 018	Pengelola Pemanfaatan barang Milik Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
9.	Nurhamna 19680930 199101 2 001	Pranata Jasmani dan Mental	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kesehatan Masyarakat
10.	Yesi Suharti A.Md.Keb 19781025 200212 2 004	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11.	Titin Sri Mulyani, A.Md.Kep 19850113 201001 2 020	Pengelola Data	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pelayanan Kesehatan
12.	Widya Trisna Adry, S.Kom 19940331 201902 2 005	Analis Sistem Informasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Kesehatan

13. Harry .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
13.	Harry Saputra,S.Farm,Apt 19850406 201001 1 029	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT Instalasi Farmasi
14.	Mira Ulandari Tanjung, A.Md.Farm 19841107 200901 2 005	Pengelola Kefarmasian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Instalasi Farmasi
15.	Ns. Wita Mardiyanti, S.Kep 19801025 200501 2 006	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum I
16.	Dita Febriani Putri ,AMd.Akun 1992201 202203 2 007	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
17.	Sri Zekiarti 19800123 200212 2 005	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
18.	Drg. Merry Viany 19800513 200801 2 006	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum II
19.	Dewi Sutriani, Amd. Keb 19780802 200701 2 003	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
20.	Rendra Perwira, AMKG 19840609 200901 1 005	Terapis Gigi dan Mulut Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
21.	Dr. Jonefi 19801209 200901 1 007	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab I
22.	Vella Sri Oktavia, S.Farm, Apt 19931005 202012 2 017	Ahli Pertama - Apoteker	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
23.	Faidhil Anzil, Amd. RM 19880517 201001 1 003	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
24.	Richa Anggraini, S.Farm,Apt 19821207 200701 2 007	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab II
25.	Ferdian Martha Putra,AMd,Ak 19981123 202203 1 009	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II
26.	Rini Afniza, S.SiT 19830404 200604 2 018	Nutrisionis Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II

27. Idealisa .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
27.	Idealisa, SKM 19650409 198803 2 002	Kepala UPT Puskesmas Gurun	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gurun
28.	Mardatila Nova, A.Md.Keb 19850720 200901 2 008	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Gurun
29.	Elvira, A.Md, AFM 19811001 200701 2 003	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Gurun
30.	Drg. Wirsya Yanti 19680410 200012 2 002	Kepala UPT Puskesmas Pariangan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pariangan
31.	Sri Mitra Evita, AMAK 19750424 199503 2 002	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pariangan
32.	Rismalinda, A.Md.Keb 19760405 200604 2 014	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pariangan
33.	Sulastri Maiyusra, S.Tr.Keb 19680505 199001 2 002	Kepala UPT Puskesmas Rambatan I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan I
34.	Rafika Muharramah, S.Farm.Apt 19950612 202012 2 021	APOTEKER PERTAMA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan I
35.	Irma Susanti, AMKL 19870107 201001 2 018	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan I
36.	Dr. Mahdalena Lubis 19760828 200604 2 012	Kepala UPT Puskesmas Rambatan II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan II
37.	Ns. Arnelis, S.Kep 19770614 200012 2 003	Perawat Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan II
38.	Eli Deswati, A.Md.Keb 19730708 199302 2 001	Bidan Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan II
39.	Dr. Yogi Fernando 19870506 201902 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara I
40.	Betri Diana Putri, AMKG 19870408 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I

41. Mona .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
41.	Mona Sri Wahyuni,A.Md 19940609 202203 2 016	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I
42.	Dr.Astri Anggreni 19901229 201902 2 003	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo
43.	Anggun Setiawan, A.Md. Kep 19910917 201902 1 004	Perawat Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo
44.	Maila Aklusia Yafni, A.Md.KL 19930528 201902 2 003	Sanitarian Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo
45.	Mulyadi, SKM 19710815 199201 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara II
46.	Ns.Fitri Ruzani, S.Kep 19880617 201001 2 013	Perawat Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
47.	Hadisi Halim, A.MG 19790531 201001 2 009	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
48.	Dr. Ira Novithadewy 19781108 200604 2 013	Kepala UPT Puskesmas Sungayang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungayang
49.	Fenny Kesuma Dewi 19870416 202203 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungayang
50.	Fitrah Illahi, A.Md.Gz 19960713 201902 2 001	Nutrisionis Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungayang
51.	Ikhwanul Fadli, S.Farm, Apt 19950819 202012 1 006	Kepala UPT Puskesmas Padang Ganting	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Padang Ganting
52.	Hana Sofia Angrayeni, A.Md.KL 19920915 201902 2 007	Sanitarian Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Padang Ganting
53.	C. Merry Kusumawati, AMKG 19860205 200901 2 008	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Padang Ganting

54. Dr. Yendra .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
54.	Dr. Yendra Afriza 19700429 200212 2 001	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Emas	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjung Emas
55.	Putri Amaliza,Amd 19950308 202203 2 010	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
56.	Febridayeni Maryori,AMKL 19910201 2019 2 004	Sanitarian Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
57.	Dr. Melly Aulia 19830211 200901 2 007	Kepala UPT Puskesmas Pagaruyung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pagaruyung
58.	Ns.Rina Angelina, AMd.Kep 19861203 201001 2 025	Perawat Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pagaruyung
59.	Sri Yulia Susanti, AMd.Kep 19780912 199703 2 002	Perawat Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pagaruyung
60.	Dr. Yeni Handayani 19810628 200901 2 003	Kepala UPT Puskesmas X Koto I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto I
61.	Novi Andriani, A.Md.Keb 19760106 200604 2 012	Bidan Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto I
62.	Zerri Akmalia, AMKG 19871023 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto I
63.	Dr. Riri Novia Neri 19801110 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas X Koto II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto II
64.	Reski Sukmalili, A.Md.Kep 19870326 201902 2 001	Perawat Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto II
65.	Wirawati 19790119 200701 2 005	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto II
66.	Dr. Andrea Rivaldo 19810113 200901 1 009	Kepala UPT Puskesmas Batipuh I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh I

67. Riza ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
67.	Riza Hafianti, SKM 19791006 200501 2 003	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh I
68.	Witra Yeni, A. Md. PK 19800620 201101 2 001	Perekam Medis Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh I
69.	Drg. Rahmah El Ramadhani 19840613 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas Batipuh II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh II
70.	Rahma Yanti, S.St 19711002 199101 2 001	Bidan Madya	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh II
71.	Resti Ayu Revananda, AMd.KL 19960410 201902 2 004	Sanitarian Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh II
72.	Vina Indriani, S.Tr.Keb 19790704 200212 2 007	Ka. UPT Puskesmas Batipuh Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh Selatan
73.	Popi Indira,AMKG 19840602 200501 2 002	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
74.	Lola 19810115 200212 2 001	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
75.	Halimah, S.ST 19690313 198912 2 001	Kepala UPT Puskesmas Singgalang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Singgalang
76.	Sri Madeni, Am. AFM 19811129 200501 2 004	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Singgalang
77.	Eka Nalurita,AMG 19811129 200501 2 004	Nutrisionis Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Singgalang
78.	Dr. Hanif Al Muhamady Hasyim 19801227 200901 1 005	Kepala UPT Puskesmas Salimpaung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Salimpaung
79.	Sesmaryeni, AMS 19740527 200604 2 009	Sanitarian Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salimpaung
80.	Gita Rahma Yanti 19940819 202012 2 021	Apoteker Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Salimpaung

81. Ns. Nadhatun ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
81.	Ns. Nahdhatun Nasyiah, S.Kep 19690505 199203 2 005	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Baru	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjung Baru
82.	Mira Oktavia, S. Kep 19871013 201001 2 012	Perawat Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjung Baru
83.	Yenti Susanti, Amd.AK 19820519 201101 2 006	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjung Baru

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/6/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Nomor 900/036/Set-Keu/RSUD/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023; dan

2.Surat Pernyataan Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Nomor 900/007/Set-Keu/RSUD/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.menandatangani...

h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c.melaksanakan...

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku KPA meliputi :
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

d.Bendahara...

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/6/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA RSUD PROF. HANAFIAH SM

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
RSUD PROF. HANAFIAH SM

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. NURMAN EKA PUTRA 19710611 200604 1 004	Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Pengguna Anggaran
2.	SUWANTO HARTONO,SKM, M.Kes 19670113 198702 1 001	Sekretaris pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	Ns.ROZA MARDIAH, S.Kep.M.Kep 19760805 199503 2 001	Kabid Pelayanan pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan
4.	dr. ARIES SUMANTRI, MH 19700410 200604 1 005	Kabid Penunjang pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penunjang
5.	ROSI YUNITA, ST 19790604 2000003 2 003	Bendahara	Bendahara Penerima
6.	AINI ATMA PERMATA 19861027 200901 2 003	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
7.	SRI RAHMALIZA, SKM 19871101 200901 2 001	Pengelola Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
8.	WERY MARNEVY 19751229 200701 2 003	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan
9.	FITRI RAHMADANI 19860607 200901 2 004	Pengelola Keperawatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penunjang

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/7/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900/01.1/DPU/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;dan

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900/01/DPU/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e.melakukan...

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

e.menyiapkan...

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang selaku KPA meliputi:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

d.Bendahara...

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/268/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

c. Keputusan Bupati Nomor 954/302/BKD-2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

d. Keputusan Bupati Nomor 954/158/BKD-2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

e. Keputusan Bupati Nomor 954/226/BKD-2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;dan

f. Keputusan Bupati Nomor 954/321/BKD-2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 954/88/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/7/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	THAMRIN, ST 19660107 199403 1 004	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
3.	ALHADI, S,ST, MT 19790912 200212 1 001	Kepala Bidang PSDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	BUJANG FIRDAUS 19730202 200604 1 011	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	NOFIARTI 19651102 198703 2 003	Pengelola Keungan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keungan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keungan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/8/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 820.21/836/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Nomor 900/61/Pertanian/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);dan

3. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 900/53/Set-Pertanian/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

d. melakukan ....

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;

b.melakukan...

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku KPA meliputi :
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b.melaksanakan...

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA...

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran; dan

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/128/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/199/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/128/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian; dan

c. Keputusan Bupati Nomor 954/365/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/128/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 8/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SRI MULYANI, SP.M.Si 19730312 200003 2 005	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran
2.	WEL EMBRA, SP 19780819 200501 1 006	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tanaman Pangan
3.	Drh. ROKI MARTARIKA 19790321 200901 1 006	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	DIANI SAFITRI, S.TP 19940623 202012 2 019	Analis Pengolah Hasil Pertanian	Bendahara Pengeluaran
5.	METHA OKTORAFIANI, SP 19811005 200605 2 002	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Tanaman Pangan
6.	WINDA, S.Pt 19890429 201902 2 005	Pengawas Mutu Ahli Pakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	RINDA DANI KURNIA, S.Pt 19900906 201902 2 003	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 9 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/ BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar; dan

2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/021/ Renkeu/Setda-2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Usulan Perubahan Nama Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;

c.melakukan...

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara....

3. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain ...

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bagian selaku KPA meliputi :
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :
   1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang;
      a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
      b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

c.menerima ...

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c.Bendahara...

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/297/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/446/BKD-2021 Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/297/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

c. Keputusan Bupati Nomor 954/65/BKD-2022 Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/297/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

d. Keputusan Bupati Nomor 954/124/BKD-2022 Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/297/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;dan

e. Keputusan ..

e. Keputusan Bupati Nomor 954/270/BKD-2022 Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/297/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 9/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si 19680803 198809 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	Dra. RENI SUSANTI 19720516 199203 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemeritahan
3.	ALINARDUS, S.Ag, MA 19711215 199803 1 002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
5.	MASNI YULETRI, SE. MM 19760817 199701 2 001	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
6.	TEN FERI, ST, M.Si 19750210 200003 1 001	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
7.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	IRSYAD, S.Sos, M.AP 19710604 200501 2 008	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
9.	SYOFA NOVA BUDIANTO, SH 19740612 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
10.	DEDI TRIWIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	WATMA YENTI 19821130 200701 2 003	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Penerima
13.	DESRIA IMELDA, SE 19841218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran

14. NENI YURITIKA...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
14	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	RIKA PUSPITA SARI, SAP 19841212 201001 2 010	Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
16.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analis Bina Kehidupan Agama Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
18.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
19.	RINI DESWITA 19690903 200701 2 003	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	DILLA GUSTIANA, A.Md 19880819 201101 2 007	Pengelola Keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
21.	HENDRI HASAN 19651015 199103 1 011	Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
22.	NURDARIMAS, S.SOS 19691221 199503 2 004	Analis Tata Usaha pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Verifikator pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAPUTRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/10/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar 820.21/835/BKPSDM 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

i.menyusun...

i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/62/BKD-2020 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/437/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/62/BKD-2022 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;dan

c. Keputusan Bupati Nomor 954/438/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/62/BKD-2022 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/10/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. ERMON REVLIN, MPH 19690313 200212 1 005	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran
2.	YUNITA 19680814 200604 2 002	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/11/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nomor 516/21/Koperindag/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nomor 516/26/Koperindag/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d.melaksanakan...

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;

b.melakukan...

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang selaku KPA meliputi :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b.melaksanakan...

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA...

KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran; dan

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/67/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/149/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/67/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/11/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. HENDRA SETIAWAN,M.Si 19720710 199203 1 007	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2.	ANDRY, SE 19710426 200212 1 002	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Koperasi dan UKM
3.	WILDA ANAS, SE 19740801 200212 2 007	Kepala Bidang Perindustrian	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perindustrian
4.	ZULHENDRIANTO, A.Md 19760112 201001 1 013	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5.	SUGIYAH 19730304 200701 2 006	Bendahara	Bendahara Penerima
6.	RIRIN LISTRIANA 19940915 202012 2 013	Penyusun Perencana Pengembangan Produk Skala Mikro	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Koperasi dan UKM
7.	WIDDONDRI 19750820 200701 1 007	Pengadministrasi Keamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perindustrian

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/12/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Nomor 900/53/PolPP dan Damkar-2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g.mengadakan...

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f.membuat...

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
a. Keputusan Bupati Nomor 954/166/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/122/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/166/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/12/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HARFIAN FIKRI, S.Sos 19680525 198809 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran
2.	WILDA AFRIANY, S.Ak 19810401 201001 2 019	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
3.	MIKKO SANDRA 19760113 199703 1 006	Pengelola Pengendalian Masyarakat	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/13/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900/01/Kesbangpol/2023, tanggal 02 Januari 2023 Perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

i.menyusun...

i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/69/BKD-2021 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/227/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/69/BKD-2021 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/13/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. HERISON 19800619 198902 1 002	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran
2.	DIANA ETIKA HAIRANI AMRI, A.md 19920626 202203 2 016	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 14 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

m.melaksanakan....

m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
   a. Keputusan Bupati Nomor 954/298/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.Keputusan....

b. Keputusan Bupati Nomor 954/123/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/298/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;dan
c. Keputusan Bupati Nomor 954/203/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/298/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 14/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. YUHARDI 19650909 199203 1 007	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengguna Anggaran
2.	MAWARDI, A.Md 19820901 201001 1 025	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/15/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA INSPEKTORAT .

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n.melaksanakan ...

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/57/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/15/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	DESI RIMA, SH 19651212 199403 2 005	Inspektur	Pengguna Anggaran
2.	DIMAS WAHYU ANDRYANTO, S.AP 19830724 200801 1 010	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/16/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/835/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k.mengawasi ...

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT ...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/247/BKD-2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/16 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. HELFY RAHMY HARUN 19671029 199403 2 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran
2.	RAHMADIAN OKTAMINDA, A.Md 19841005 200902 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/17/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan ...

l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA ...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/304/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/17/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. ALFIAN JAMRAH, M.Si 19660917 198609 1 001	Kepala Bapeda dan Litbang	Pengguna Anggaran
2.	ELVARINA, A.Md 19870118 201001 2 016	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/18/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/836/ BKPSDM/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/22/PMDPPKB/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;dan

3.Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/23/Keu/PMDPPKB/ 2023 tanggal 3 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
   n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;

d.menolak....

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang selaku KPA meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b.menerima...

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e.Bendahara...

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/59/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/125/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/59/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/18 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ABDURRAHMAN HADI, S.STP ,MSi 19790723 199810 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran
2.	RERI WARMAN, SKM 19680228 199102 1 002	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	QUM ZAIDAN MARHANI, A.Md 19980317 202012 2 003	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	ENDANG OKTAYANI, SKM 19941019 202012 2 008	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/19/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA .

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
   n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Bendahara...

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA....

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/368/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/19/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	JASRINALDI, SH, S.Sos 19671130 199202 1 002	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran
2.	RATIH HELMITRISE, A.Md 19910228 201403 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/20/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan diteyapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/312/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. Keputusan Bupati Nomor 954/126/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/312/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
c. Keputusan Bupati Nomor 954/219/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/312/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/20/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. YUSRIZAL, MM 19660601 1994403 1 005	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran
2.	JELITA, A.Md.Kom 19930414 201902 2 006	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
3.	YENI HANAFIAH, S.I.KOM 19890108 201902 2 001	Analis Publikasi	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/21/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n.melaksanakan...

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA...

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/311/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan;dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/205/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/311/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/21/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	NUSYIRWAN, SH, S.Sos, MT 19690522 199202 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran
2.	LILIS SERLINA, S.Sos 19780710 200604 2 021	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
3.	ISMAN 19690926 199403 1 002	Bendahara	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/22/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900/29/Parpora/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023; dan
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900/30/Parpora/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola ...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
   c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;

d.menolak...

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
   c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
   d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
   e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;

b.memeriksa...

b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada pada tahun berjalan; dan
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KEEMPAT :Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/127/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/155/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/127/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

c.Keputusan...

c. Keputusan Bupati Nomor 954/316/BKD-2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/127/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan

d. Keputusan Bupati Nomor 954/157/BKD-2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/127/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/22/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HENDRI AGUNG INDRIANTO, B.Mgt.MHSPS 19731228 200604 1 008	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	YESSI AKMALIZA, AP, S,Sos 19740323 199311 2 001	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	EFRISON, SE 19720722 199403 1 005	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pariwisata
4.	ISMAIL, S.Pd 19690330 199109 1 001	Kepala Bidang Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Olahraga
5.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Bendahara	Bendahara Penerimaan
6.	DASRIZAL 19770522 200701 2 006	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
7.	NUR ELYA INSANI, SE 19960612 202012 2 019	Analis Ekonomi Kreatif	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
8.	RISKY TRI MENTARIE, A.Md 19930913 202012 2 015	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pariwisata
9.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Pembudayaan Olahraga	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/23/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAYANG

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan :Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAYANG.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.menyusun...

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
i. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
j. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
k. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 954/324/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/23/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAYANG

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAYANG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	NARTI, SSTP 19791205 199810 2 001	Camat Sungayang	Pengguna Anggaran
2.	ORINA DESFITA, A.Md 19970223 202012 2 010	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/24/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LIMA KAUM

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LIMA KAUM.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/321/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/206/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/321/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 24/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LIMA KAUM

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LIMA KAUM

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	IKRAR PAHLEPI, S,STP 19851030 200312 1 001	Camat Lima Kaum	Pengguna Anggaran
2.	BOBY ERIANTANTO 19840213 201406 1 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/25/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/440/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/25 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN BATIPUH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ABDI HARDIFALA, S.IP, M.Si 19871229 200701 1 002	Camat Batipuh	Pengguna Anggaran
2.	NOFITA 19821116 201406 2 005	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 26 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan ...

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA ....

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/322/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/72/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/322/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/26/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN TANJUNG EMAS

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ZULKIFLI IDRIS, S.Sos 19661029 198903 1 007	Camat Tanjung Emas	Pengguna Anggaran
2.	LENI MARDELA, SE 19870316 201902 2 002	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Tanjung Emas	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/27/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN PADANG GANTING.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j.menyusun...

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/328/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/473/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/322/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/27/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN PADANG GANTING

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YATRIWEL, S.Sos 19661215 198903 1 005	Camat Padang Ganting	Pengguna Anggaran
2.	ATIKA AMALIA, A.Md.Ak 19970624 202012 2 013	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/27 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN PADANG GANTING.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j.menyusun...

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/328/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/473/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/328/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/27 /BPKD-2023
TANGGAL 4 Januari 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN PADANG GANTING

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YATRIWEL, S.Sos 19661215 198903 1 005	Camat Padang Ganting	Pengguna Anggaran
2.	ATIKA AMALIA, A.Md.Ak 19970624 202012 2 013	Pelaksana pada Kecamatan Padang Ganting	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/28 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan ...

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/323/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/66/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/323/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SARITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/28/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LINTAU BUO

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	AFRIZAL, SE 19670330 198903 1 005	Camat Lintau Buo	Pengguna Anggaran
2.	VINNY HARDIANTI ERZA,A.Md 19970402 202012 2 018	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/29/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

l.menetapkan ...

l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/159/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/330/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/159/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/29/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ARIEF GANI, S.STP 19821114 200112 1 002	Camat Lintau Buo Utara	Pengguna Anggaran
2.	NURNANINGSIH 19820118 201001 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/30/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

l.menetapkan ...

l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA ...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/318/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/364/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/318/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/30/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN X KOTO

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ADIAWARMAN, S.Sos, MP 19670520 198903 1 011	Camat	Pengguna Anggaran
2.	SINTA OKTA IRMA, SE 19951010 201902 2 005	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SARTRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/31/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan ...

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan, Keputusan Bupati Nomor 954/327/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kecamatan Salimpaung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/31/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HERRU RACHMAN, S.STP 19870702 200602 1 002	Camat Salimpaung	Pengguna Anggaran
2.	HIRVAN BAYU REVINDRA, A.Md 19980106 202012 1 004	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/32/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG BARU

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN TANJUNG BARU.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m.menetapkan ...

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/160/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/329/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/160/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/32/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG BARU

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN TANJUNG BARU

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RIKI AFRIZALDI, S.STP 19830123 200112 1 004	Camat Tanjung Baru	Pengguna Anggaran
2.	KORI YANDRAMIMI 19820814 201212 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/33/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN RAMBATAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN RAMBATAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 954/320/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/33 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN RAMBATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN RAMBATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ROZA MALFITA, S.STP 19860405 200412 2 001	Camat Rambatan	Pengguna Anggaran
2.	RAUDYA TUZZAHRA, A.Md.Ak 19970121 202012 2 013	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/34/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PARIANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/837/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN PARIANGAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.Bendahara...

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/157/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/326/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/157/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/34 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PARIANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN PARIANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MULKHAIRI, S.Pd 19820326 200501 1 006	Camat Pariangan	Pengguna Anggaran
2.	FRITA FLORENSIA, SE 19840816 201902 2 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/35 /BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m.menetapkan ...

l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA....

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/325/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 954/68/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/325/ BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/35/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ARIANTO, SSTP 19760705 199511 1 006	Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/36/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan ...

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/158/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/331/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/158/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan;

c. Keputusan Bupati Nomor 954/104/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/158/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/36/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN BATIPUH SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BENNY YOHENDRI, S.Sos 19651007 198602 1 001	Camat Batipuh Selatan	Pengguna Anggaran
2.	OKY OKTAVIANUS, A.Md 19911013 202012 1 006	Verifikator Keuangan pada Kecamatan Batipuh Selatan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/37/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

KEDUA :1. Keputusan Bupati Nomor 820.21/834/BKPSDM-2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Nomor 900/01/Bapenda-2023, tanggal 4 Januari 2023 Perihal Usulan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;

i.mengelola...

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5.Selain...

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.SI
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/37 /BPKD-2023
TANGGAL 4 Januari 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	DARFIZAL, SE, M.Si 19650518 199003 1 006	Kepala Bapenda	Pengguna Anggaran
2.	NADYA WAHYUNI, A.Md 19970629 202012 2 009	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
3.	ADMIRA, S.Ak 19740309 200902 2 002	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.SI
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/38/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/872/Sosial/2022, tanggal 7 Desember 2022 Perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

i.menyusun...

i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/307/BKD-2020 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/156/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/307/ BKD-2020 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;dan

c. Keputusan Bupati Nomor 954/218/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/307/BKD-2020 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/38/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	AFRIZON, S.Ag 19721202 199903 1 003	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran
2.	ROSSI DARMAYANTI, A.Md 19960810 202203 2 013	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/39/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n.melaksanakan...

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA...

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Nomor 954/56/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan;
b. Keputusan Bupati Nomor 954/308/BKD-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/56/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan; dan
c. Keputusan Bupati Nomor 954/127/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/56/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/39/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. SUHERMEN 19660609 198602 1 001	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran
2.	HAMDANUR IRFAN, S.Pi 19890118 201902 1 001	Analis Aquakultur	Bendahara Pengeluaran
3.	JUMAIDI EFENDI, S.Pi 19950602 201902 1 003	Analis Aquakultur	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/40/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 660/90/Set/Perkim-LH/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.menandatangani...

h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
   b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
   c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
   d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
   e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

4. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

g.memungut...

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :
   a. Keputusan Bupati Nomor 954/55/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

   b. Keputusan Bupati Nomor 954/70/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/55/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup; dan

c.Keputusan ...

c. Keputusan Bupati Nomor 954/519/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/55/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/40/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. NOFI HENDRI, MT 19661115 199308 1 001	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran
2.	SYURGANIL YUSRA 19651024 198601 2 001	Verifikator Keuangan	Bendahara Penerimaan
3.	AGUSTI, S.Pd 19810802 200901 2 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/41/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
   l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
   m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Bendahara...

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
   a. Keputusan Bupati Nomor 954/309/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

b.Keputusan...

b. Keputusan Bupati Nomor 954/202/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/309/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/41/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. ARMEN YUDI, M.Si 19681226 198903 1 006	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran
2.	VIVI MUKJIZAH, A.Md 19851004 201001 2 033	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/42/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Menetapkan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/002/BKPSDM-2023, tanggal 3 Januari 2023 atas Nama Drs. Elvi Sandry, M.Si sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

j.mengawasi...

j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan

b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT...

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/92/BKD-2020 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/42 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. ELVI SANDRY, M.Si 19660717 198602 1 002	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pengguna Anggaran
2.	HASNUL FAJRI, A.Md 19810308 201001 1 014	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/43/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   g. menandatangani SPM;
   h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
   j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   k. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

l.menetapkan ...

l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
   g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
   a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
   b. memeriksa kas secara periodik;
   c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
   d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
   e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
   a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
   b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Nomor 954/306/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Keputusan Bupati Nomor 954/97/BKD-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/306/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

c. Keputusan Bupati Nomor 954/148/BKD-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/306/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/43 /BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YUSNEN, S.Ag, M.Si 19701026 199103 1 002	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran
2.	FADHLY ZUL AKMAL, ST 19930607 201902 1 003	Analisis Bangunan dan Perumahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/108/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan usulan Camat Kecamatan Sungai Tarab, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/036 /BKPSDM-2023, tanggal 27 Februari 2023 atas nama Yetty Asben, SE. M.Si sebagai Plt Camat Sungai Tarab.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Arianto, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab; dan
   - mengangkat Saudari Yetty Asben, SE. M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab.

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak Surat Perintah Pelaksanaan Tugas sebagai Plt. Camat Sungai Tarab;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/108/BPKD-2023
TANGGAL 2 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YETTY ASBEN, SE. M.Si 19691225 199003 2 003	Plt. Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/149/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Sungai Tarab, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/108/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/047 /BKPSDM-2023, tanggal 7 Maret 2023 atas nama Sri Handayani, S.IP MM sebagai Plt Camat Sungai Tarab.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudari Yetty Asben, SE. M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab; dan
   - mengangkat Saudari Sri Handayani S.IP MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab.

b. Pengguna ...

c. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak Surat Perintah Pelaksanaan Tugas sebagai Plt. Camat Sungai Tarab;

d. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/149/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SRI HANDAYANI, S.IP, MM 19881130 200701 2 001	Plt. Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 149 /BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Sungai Tarab, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/108/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/047 /BKPSDM-2023, tanggal 7 Maret 2023 atas nama Sri Handayani, S.IP MM sebagai Plt Camat Sungai Tarab.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudari Yetty Asben, SE. M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab; dan
   - mengangkat Saudari Sri Handayani S.IP MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab.

b. Pengguna ...

c. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak Surat Perintah Pelaksanaan Tugas sebagai Plt. Camat Sungai Tarab;

d. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/149/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SRI HANDAYANI, S.IP, MM 19881130 200701 2 001	Plt. Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/150/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/19/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/213/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/19/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Jasrinaldi, SH, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
   - mengangkat Saudari Ir. Dessy Trikorina sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/150/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. DESSY TRIKORINA 19651219 199403 2 003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran
2.	RATIH HELMITRISE, A.Md 19910228 201403 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/151/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/39/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/39/BKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/39/BKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Nomor 900/54/Set-DPP/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Perubahan Usulan Pengelola Keuangan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/39/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/39/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Hamdanur Irfan, S.Pi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan dan Perikanan; dan
   - mengangkat Saudari Chintia A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan dan Perikanan,

b. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA....

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ /BPKD-2023
TANGGAL 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. SUHERMEN 19660609 198602 1 001	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran
2.	CHINTIA, A.Md. Akun 19980521 202203 2 016	Verifikator Keuangan pada Dinas Pangan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran
3.	JUMAIDI EFENDI, S.Pi 19950602 201902 1 003	Analis Aquakultur pada Dinas Pangan dan Perikanan	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/ 152 /BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Nomor 820/150/Parpora-TD/2023, tanggal 7 Maret 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Dinas Parpora Th 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudari Yessy Akmaliza, AP, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;dan

- mengangkat Saudara Afrizal, SE sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

b. memberhentikan ....

b. - memberhentikan Saudara Ismail, S.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan

- mengangkat Saudara Radianus, S.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/152/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HENDRI AGUNG INDRIANTO, B.Mgt, MHSPS 19731228 200604 1 004	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	AFRIZAL, SE 19670330 198903 1 005	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	EFRISON, SE 19720722 199403 1 005	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pariwisata
4.	RADIANUS, S.Pd 1982090921 200803 1 001	Kepala Bidang Keolahragaan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Olahraga
5.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Bendahara Penerimaan
6.	DASRIZAL 19770522 200701 1 004	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
7.	NUR ELYA INSANI, SE 199612 2002012 2 019	Analis Ekonomi Kreatif	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
8.	RISKY TRI MENTARIE, A.Md 19930913 202012 2 015	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pariwisata
9.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Kasi Olahraga Prestasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/153/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/28/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Lintau Buo, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/28/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/28/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/28/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/28/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Afrizal, SE sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lintau Buo; dan
   - mengangkat Saudara Beni Oriza, SE sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lintau Buo.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Lintau Buo;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/153/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LINTAU BUO

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BENI ORIZA, SE 19730103 199403 1 006	Camat Lintau Buo	Pengguna Anggaran
2.	VINNY HARDIANTI ERZA, A.Md 19970402 202012 2 018	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/154/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/046/BKPSDM-2023, tanggal 6 Maret 2023 atas nama Fobra Rika sebagai Plt. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Thamrin, ST sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
   - mengangkat Saudara Fobra Rika, sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahaan;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/154/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	FOBRA RIKA, ST, MT 19750516 200212 1 003	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
3.	ALHADI, S,ST, MT 19790912 200212 1 001	Kepala Bidang PSDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	BUJANG FIRDAUS 19730202 200604 1 011	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	NOFIARTI 19651102 198703 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/154/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 820/046/BKPSDM-2023, tanggal 6 Maret 2023 atas nama Fobra Rika sebagai Plt. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Thamrin, ST sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
   - mengangkat Saudara Fobra Rika, sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahaan;

c.Susunan.

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 MARET 2023

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/154/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	FOBRA RIKA, ST, MT 19750516 200212 1 003	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
3.	ALHADI, S,ST, MT 19790912 200212 1 001	Kepala Bidang PSDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	BUJANG FIRDAUS 19730202 200604 1 011	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	NOFIARTI 19651102 198703 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/155/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/4/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/4/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/4/BKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 900/778/Sekre-2023, tanggal 7 Maret 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Mengelola kegiatan dengan nilai Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/4/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU :Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/4/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan perubahan sebagai berikut:

a. mengangkat Saudari Yetty Asben, SE, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. mengangkat Saudari Darwilis, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c.Susunan ...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/155/BPKD-2023
TANGGAL 21 MARET 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RISWANDI, S.Pd, M.Pd 19660515 199003 1 009	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran
2.	YETTY ASBEN, SE, M.Si 19691225 199003 2 003	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3.	LUTHFI, S.Pd 19690904 199109 1 001	Kepala Bidang Pembinaan SD	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SD
4.	EFRI DEDY, S.Pd, MM 19720423 200604 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan
5.	DEVIRA PURNAMA, SE 19750525 200701 2 014	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP
6.	AZIZAH, A.Md 19850114 202012 2 001	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
7.	FEBRIS JULINTA, A.Md 19830201 201001 2 025	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SD
8.	Dra. ERNITA, MM 19670609 199103 2 006	Analis Peserta Didik	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMP
9.	ADNI PABRI, SAP 19771221 200701 1 005	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Ketenagaan
10.	DARWILIS, S.Sos 19710123 199103 2 004	Pengelola Data Kurikulum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/170/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/8/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pertanian, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/8/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/8/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian, Nomor 820/320/ Set-Pertanian 2023, tanggal 8 Maret 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/8/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/8/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Wel Embra, SP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian;dan

   - mengangkat Saudara Wel Embra, SP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian;

b. - memberhentikan Saudari Marve Trisna, SP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Tanaman Pangan;dan

   - mengangkat Saudari Marve Trisna, SP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penyuluhan;

c. Susunan ...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/170/BPKD-2023
TANGGAL 6 APRIL 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SRI MULYANI, SP.M.Si 19730312 200003 2 005	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran
2.	WEL EMBRA, SP 19780819 200501 1 006	Kepala Bidang Penyuluhan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penyuluhan
3.	Drh. ROKI MARTARIKA 19790321 200901 1 006	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	DIANI SAFITRI, S.TP 19940623 202012 2 019	Analis Pengolah Hasil Pertanian	Bendahara Pengeluaran
5.	MARVE TRISNA, SP 19900504 201902 2 004	Analis Pasar Hasil Pertanian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penyuluhan
6.	WINDA, S.Pt 19890429 201902 2 005	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	RINDA DANI KURNIA, S.Pt 19900906 201902 2 003	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/223/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Sekretariat Daerah, Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/449/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Ten Feri, ST. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
   - mengangkat Saudara Utri Satria Putra, ST, MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

b.memberhentikan...

b. - memberhentikan Saudara Syofa Nova Budianto, SH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
   - mengangkat Saudara Ronal Satria, S.IP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.

c. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;

d. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/223/BPKD-2023
TANGGAL 10 MEI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si 19680803 198809 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	Dra. RENI SUSANTI 19720516 199203 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemeritahan
3.	ALINARDIUS, S.Ag, MA 19711215 199803 1 002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
5.	MASNI YULETRI, SE. MM 19760817 199701 2 001	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
6.	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT 19760820 200212 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
7.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	IRSYAD, S.Sos, M.AP 19710604 200501 2 008	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
9.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 002	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
10.	DEDI TRIWIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	WATMA YENTI 19821130 200701 2 003	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Penerima
13.	DESRIA IMELDA, SE 19841218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran

14. NENI ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
14	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	RIKA PUSPITA SARI, SAP 19841212 201001 2 010	Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
16.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analis Bina Kehidupan Agama Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
18.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
19.	RINI DESWITA 19690903 200701 2 003	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	DILLA GUSTIANA, A.Md 19880819 201101 2 007	Pengelola Keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
21.	HENDRI HASAN 19651015 199103 1 011	Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
22.	NURDARIMAS, S.SOS 19691221 199503 2 004	Analis Tata Usaha pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Verifikator pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/224/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Sungai Tarab, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/149/BPKD-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/449/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/35/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudari Sri Handayani S.IP. MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab; dan
   - mengangkat Saudara A. H. Miza Aziz, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungai Tarab.

b.Pengguna ...

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik sebagai Camat Sungai Tarab;

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/224/BPKD-2023
TANGGAL 10 MEI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	A.H. MIZA AZIZ, S.Sos 19710912 200212 1 005	Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/225/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/154/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/446/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Fobra Rika, ST, MT sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
   - mengangkat Saudara Ten Feri, ST, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

b.Pengguna ...

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahaan;

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/225/BPKD-2023
TANGGAL 10 Mei 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	TEN FERI, ST, M.Si 19750210 200003 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
3.	ALHADI, S,ST, MT 19790912 200212 1 001	Kepala Bidang PSDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	BUJANG FIRDAUS 19730202 200604 1 011	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	NOFIARTI 19651102 198703 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/226/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/42/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/446/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpianan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/42/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA .

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Drs. Elvy Sandri, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   - mengangkat Saudara Syofa Nova Budianto, SH sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

c.susunan..

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/ 226 /BPKD-2023
TANGGAL 10 MEI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SYOFA NOVA BUDIANTO, SH 19740612 199403 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pengguna Anggaran
2.	HASNUL FAJRI, A.Md 19810308 201001 1 014	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/227/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/31/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Salimpaung, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/449/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/31/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Herru Rachman, S.STP, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Salimpaung; dan
   - mengangkat Saudara Khairunnas Y, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Salimpaung.

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik sebagai Camat Salimpaung;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/227/BPKD-2023
TANGGAL 10 MEI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SALIMPAUNG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	KHAIRUNNAS.Y, S.STP 19851227 200602 1 001	Camat Salimpaung	Pengguna Anggaran
2.	HIRVAN BAYU REVINDRA, A.Md 19980106 202012 1 004	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/341/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 820/125/ BKPSDM-2023, tanggal 9 Juni 2023 atas nama Herru Rachman, S.STP, MM sebagai Plh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/412/Keu/PMDPPKB/VI/2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan TA 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU ....

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Abdurrahman Hadi, S.STP, MSi sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
   - mengangkat Saudara Herru Rachman, S.STP, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/341/BPKD-2023
TANGGAL 21 JULI 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HERRU RACHMAN, S.STP, MM 19870702 200602 1 001	Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran
2.	RERI WARMAN, SKM 19680228 199102 1 002	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	QUM ZAIDAN MARHANI, A.Md 19980317 202012 2 003	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	ENDANG OKTAYANI, SKM 19941019 202012 2 008	Analis Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/348/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan pengusulan perubahan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengelola Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/341/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nomor 900/499/Keu/PMDPPKB/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal Usulan Pengelola Keuangan TA 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/18/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Herru Rachman, S.STP, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

-mengangkat ...

- mengangkat Abbdurrahman Hadi, S.STP, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/348/BPKD-2023
TANGGAL 31 JULI 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/18/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ABBDURRAHMAN HADI, S.STP, M.Si 19790723 199810 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran
2.	RERI WARMAN, SKM 19680228 199102 1 002	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	QUM ZAIDAN MARHANI, A.Md 19980317 202012 2 003	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	ENDANG OKTAYANI, SKM 19941019 202012 2 008	Analis Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/350/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan pengusulan perubahan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Pengelola Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/223/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah nomor 900/59/Renkeu/Setda-2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

a. – memberhentikan Rika Puspita Sari, S.AP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
   – Mengangkat Feby Hidayat, S.STP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/350/BPKD-2023
TANGGAL 31 JULI 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si 19680803 198809 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	Dra. RENI SUSANTI 19720516 199203 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemeritahan
3.	ALINARDIUS, S.Ag, MA 19711215 199803 1 002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
5.	MASNI YULETRI, SE. MM 19760817 199701 2 001	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
6.	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT 19760820 200212 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
7.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	IRSYAD, S.Sos, M.AP 19710604 200501 2 008	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
9.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 002	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
10.	DEDI TRIWIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	WATMA YENTI 19821130 200701 2 003	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Penerima
13.	DESRIA IMELDA, SE 19841218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran

14. NENI YURITIKA ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
14	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	FEBY HIDAYAT, S.STP 19960630 201808 1 002	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
16.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analis Bina Kehidupan Agama Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
18.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
19.	RINI DESWITA 19690903 200701 2 003	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	DILLA GUSTIANA, A.Md 19880819 201101 2 007	Pengelola Keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
21.	HENDRI HASAN 19651015 199103 1 011	Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
22.	NURDARIMAS, S.SOS 19691221 199503 2 004	Analis Tata Usaha pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Verifikator pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/350 /BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan pengusulan perubahan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Pengelola Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/223/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah nomor 900/59/Renkeu/Setda-2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

a. – memberhentikan Rika Puspita Sari, S.AP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
   – Mengangkat Feby Hidayat, S.STP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/350 /BPKD-2023
TANGGAL 31 JULI 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si 19680803 198809 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	Dra. RENI SUSANTI 19720516 199203 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemeritahan
3.	ALINARDIUS, S.Ag, MA 19711215 199803 1 002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
5.	MASNI YULETRI, SE. MM 19760817 199701 2 001	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
6.	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT 19760820 200212 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
7.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	IRSYAD, S.Sos, M.AP 19710604 200501 2 008	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
9.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 002	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
10.	DEDI TRIWIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	WATMA YENTI 19821130 200701 2 003	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Penerima
13.	DESRIA IMELDA, SE 19841218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran

14. NENI YURITIKA ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
14	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	FEBY HIDAYAT, S.STP 19960630 201808 1 002	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
16.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analis Bina Kehidupan Agama Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
18.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
19.	RINI DESWITA 19690903 200701 2 003	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	DILLA GUSTIANA, A.Md 19880819 201101 2 007	Pengelola Keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
21.	HENDRI HASAN 19651015 199103 1 011	Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
22.	NURDARIMAS, S.SOS 19691221 199503 2 004	Analis Tata Usaha pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Verifikator pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/357/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/10/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/10/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/10/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nomor 900/088/Dispusip-2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/10/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/10/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Yunita sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
   - mengangkat Saudara Rina Riati, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/357/BPKD-2023
TANGGAL 3 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/10/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. ERMON REVLIN, MPH 19690313 200212 1 005	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran
2.	RINA RIATI, A.Md 19830314 201001 2 029	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/372/BPKD-2023

TENTANG

KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam hal tidak terdapat pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa sehubungan beberapa pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu melalui penyetaraan sehingga perlu ditetapkan Kriteria Pejabat Fungsional Tertentu Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 954/29/BKD-2022 tentang Kriteria Pejabat Fungsional Tertentu Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan ;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

KESATU ...

KESATU : Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari :
a. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah; dan
b. pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah.

KEDUA : Kriteria Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. minimal pejabat fungsional tertentu ahli muda;
b. memahami proses dan manajemen kegiatan; dan
c. berintegritas.

KETIGA : Dalam hal pejabat fungsional tertentu ahli muda yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua dari subtansi kegiatan tidak ada, dapat menunjuk fungsional umum dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Tingkat I/III.b.

KEEMPAT : Kriteria Pejabat Fungsional Tertentu Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas adalah :
a. minimal pejabat fungsional tertentu ahli muda;
b. memahami proses dan manajemen kegiatan keuangan; dan
c. berintegritas.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 954/29/BKD-2022 tentang Kriteria Pejabat Fungsional Tertentu Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan:
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/378/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan pengusulan perubahan pengelola keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/152/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga nomor 800/436/Sekre-Parpora-TD/2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Usulan Nama Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Dasrizal sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
   - mengangkat Saudari Helma Yunamaulida Putri, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/378/BPKD-2023
TANGGAL 17 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HENDRI AGUNG INDRIANTO, B.Mgt, MHSPS 19731228 200604 1 004	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	AFRIZAL, SE 19670330 198903 1 005	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	EFRISON, SE 19720722 199403 1 005	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pariwisata
4.	RADIANUS, S.Pd 1982090921 200803 1 001	Kepala Bidang Keolahragaan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Olahraga
5.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Bendahara Penerimaan
6.	HELMA YUNAMAULIDA PUTRI, A.Md 19970707 202203 2 005	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
7.	NUR ELYA INSANI, SE 19960612 2020012 2 019	Analis Ekonomi Kreatif	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
8.	RISKY TRI MENTARIE, A.Md 19930913 202012 2 015	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pariwisata
9.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Kasi Olahraga Prestasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/379/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/30/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan X Koto, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/2077/BKPSDM-2023, tanggal 27 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/30/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Saudara Adiawarman, S.Sos, MP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan X Koto; dan
   - mengangkat Saudara Drs. Mukhlis sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan X Koto.

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat X Koto;

c.Susunan...

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 954/379/BPKD-2023
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/30/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. MUKHLIS 19690819 198902 1 001	Camat X Koto	Pengguna Anggaran
2.	SINTA OKTA IRMA, SE 19951010 201902 2 005	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/390/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/5/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Kesehatan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/5/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/5/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/2064/BKPSDM-2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala UPT Peskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan;

2.Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/1118/ Sekretariat-2023 tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan TA 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/5/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/5/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Idealisa, S.KM sebagai Pengguna Anggaran pada UPT Puskemas Gurun Dinas Kesehatan; dan
   - mengangkat dr. Sukma Dewi sebagai Pengguna Anggaran pada UPT Puskemas Gurun Dinas Kesehatan.

b.Pengguna ...

b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala UPT Puskesmas Gurun;

c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :100.3.3.2/390/BPKD-2023
TANGGAL :
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/5/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Yesrita Zedrianis, M.Kes 19650906 199903 2 001	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran
2.	Veri Winora, ST 19760808 200604 1 007	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	Dr. Susi Julianti 19710719 200312 2 001	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat
4.	Dr. Eva Darmasari, M.Biomed 19720904 200212 2 001	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.	Purwanto, SP.MPH 19700604 199103 1 005	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan
6.	Boy Antoni Putra, S.Kep 19800217 200212 1 004	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Sri Mega Rakhmayanti, SE 19830102 201001 2 029	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
8.	Salwa Afdal, A.Md 19961119 202012 2 018	Pengelola Pemanfaatan barang Milik Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
9.	Nurhamna 19680930 199101 2 001	Pranata Jasmani dan Mental	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kesehatan Masyarakat
10.	Yesi Suharti A.Md.Keb 19781025 200212 2 004	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11.	Titin Sri Mulyani, A.Md.Kep 19850113 201001 2 020	Pengelola Data	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pelayanan Kesehatan
12.	Widya Trisna Adry, S.Kom 19940331 201902 2 005	Analis Sistem Informasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Kesehatan

13. Harry Saputra, S.Farm,Apt .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
13.	Harry Saputra,S.Farm,Apt 19850406 201001 1 029	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT Instalasi Farmasi
14.	Mira Ulandari Tanjung, A.Md.Farm 19841107 200901 2 005	Pengelola Kefarmasian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Instalasi Farmasi
15.	Ns. Wita Mardiyanti, S.Kep 19801025 200501 2 006	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum I
16.	Dita Febriani Putri ,AMd.Akun 1992201 202203 2 007	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
17.	Sri Zekiarti 19800123 200212 2 005	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
18.	Drg. Merry Viany 19800513 200801 2 006	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum II
19.	Dewi Sutriani, Amd. Keb 19780802 200701 2 003	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
20.	Rendra Perwira, AMKG 19840609 200901 1 005	Terapis Gigi dan Mulut Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
21.	Dr. Jonefi 19801209 200901 1 007	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab I
22.	Vella Sri Oktavia, S.Farm, Apt 19931005 202012 2 017	Ahli Pertama - Apoteker	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
23.	Faidhil Anzil, Amd. RM 19880517 201001 1 003	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
24.	Richa Anggraini, S.Farm,Apt 19821207 200701 2 007	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab II
25.	Ferdian Martha Putra,AMd,Ak 19981123 202203 1 009	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II
26.	Rini Afniza, S.SiT 19830404 200604 2 018	Nutrisionis Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II

27. Dr. Sukma Dewi .....

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
27.	Dr. Sukma Dewi 19700404 200212 2 003	Kepala UPT Puskesmas Gurun	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gurun
28.	Mardatila Nova, A.Md.Keb 19850720 200901 2 008	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Gurun
29.	Elvira, A.Md, AFM 19811001 200701 2 003	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Gurun
30.	Drg. Wirsya Yanti 19680410 200012 2 002	Kepala UPT Puskesmas Pariangan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pariangan
31.	Sri Mitra Evita, AMAK 19750424 199503 2 002	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pariangan
32.	Rismalinda, A.Md.Keb 19760405 200604 2 014	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pariangan
33.	Sulastri Maiyusra, S.Tr.Keb 19680505 199001 2 002	Kepala UPT Puskesmas Rambatan I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan I
34.	Rafika Muharramah, S.Farm.Apt 19950612 202012 2 021	APOTEKER PERTAMA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan I
35.	Irma Susanti, AMKL 19870107 201001 2 018	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan I
36.	Dr. Mahdalena Lubis 19760828 200604 2 012	Kepala UPT Puskesmas Rambatan II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan II
37.	Ns. Arnelis, S.Kep 19770614 200012 2 003	Perawat Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan II
38.	Eli Deswati, A.Md.Keb 19730708 199302 2 001	Bidan Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan II
39.	Dr. Yogi Fernando 19870506 201902 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara I
40.	Betri Diana Putri, AMKG 19870408 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I

41. Mona Sri Wahyuni, A.Md ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
41.	Mona Sri Wahyuni,A.Md 19940609 202203 2 016	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I
42.	Dr.Astri Anggreini 19901229 201902 2 003	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo
43.	Anggun Setiawan, A.Md. Kep 19910917 201902 1 004	Perawat Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo
44.	Maila Aklusia Yafni, A.Md.KL 19930528 201902 2 003	Sanitarian Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo
45.	Mulyadi, SKM 19710815 199201 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara II
46.	Ns.Fitri Ruzani, S.Kep 19880617 201001 2 013	Perawat Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
47.	Hadisi Halim, A.MG 19790531 201001 2 009	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
48.	Dr. Ira Novithadewy 19781108 200604 2 013	Kepala UPT Puskesmas Sungayang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungayang
49.	Fenny Kesuma Dewi 19870416 202203 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungayang
50.	Fitrah Illahi, A.Md.Gz 19960713 201902 2 001	Nutrisionis Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungayang
51.	Ikhwanul Fadli, S.Farm, Apt 19950819 202012 1 006	Kepala UPT Puskesmas Padang Ganting	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Padang Ganting
52.	Hana Sofia Angrayeni, A.Md.KL 19920915 201902 2 007	Sanitarian Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Padang Ganting
53.	C. Merry Kusumawati, AMKG 19860205 200901 2 008	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Padang Ganting

54. Dr. Yendra Afriza ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
54.	Dr. Yendra Afriza 19700429 200212 2 001	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Emas	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjung Emas
55.	Putri Amaliza,Amd 19950308 202203 2 010	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
56.	Febridayeni Maryori,AMKL 19910201 2019 2 004	Sanitarian Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
57.	Dr. Melly Aulia 19830211 200901 2 007	Kepala UPT Puskesmas Pagaruyung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pagaruyung
58.	Ns.Rina Angelina, AMd.Kep 19861203 201001 2 025	Perawat Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pagaruyung
59.	Sri Yulia Susanti, AMd.Kep 19780912 199703 2 002	Perawat Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pagaruyung
60.	Dr. Yeni Handayani 19810628 200901 2 003	Kepala UPT Puskesmas X Koto I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto I
61.	Novi Andriani, A.Md.Keb 19760106 200604 2 012	Bidan Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto I
62.	Zerri Akmalia, AMKG 19871023 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto I
63.	Dr. Riri Novia Neri 19801110 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas X Koto II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto II
64.	Reski Sukmalili, A.Md.Kep 19870326 201902 2 001	Perawat Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto II
65.	Wirawati 19790119 200701 2 005	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto II
66.	Dr. Andrea Rivaldo 19810113 200901 1 009	Kepala UPT Puskesmas Batipuh I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh I

67. Riza Hafianti, SKM ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
81.	Ns. Nahdhatun Nasyiah, S.Kep 19690505 199203 2 005	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Baru	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjung Baru
82.	Mira Oktavia, S. Kep 19871013 201001 2 012	Perawat Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjung Baru
83.	Yenti Susanti, Amd.AK 19820519 201101 2 006	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjung Baru

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
67.	Riza Hafianti, SKM 19791006 200501 2 003	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh I
68.	Witra Yeni, A. Md. PK 19800620 201101 2 001	Perekam Medis Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh I
69.	Drg. Rahmah El Ramadhani 19840613 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas Batipuh II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh II
70.	Rahma Yanti, S.St 19711002 199101 2 001	Bidan Madya	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh II
71.	Resti Ayu Revananda, AMd.KL 19960410 201902 2 004	Sanitarian Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh II
72.	Vina Indriani, S.Tr.Keb 19790704 200212 2 007	Ka. UPT Puskesmas Batipuh Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh Selatan
73.	Popi Indira,AMKG 19840602 200501 2 002	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
74.	Lola 19810115 200212 2 001	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
75.	Halimah, S.ST 19690313 198912 2 001	Kepala UPT Puskesmas Singgalang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Singgalang
76.	Sri Madeni, Am. AFM 19811129 200501 2 004	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Singgalang
77.	Eka Nalurita,AMG 19811129 200501 2 004	Nutrisionis Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Singgalang
78.	Dr. Hanif Al Muhamady Hasyim 19801227 200901 1 005	Kepala UPT Puskesmas Salimpaung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Salimpaung
79.	Sesmaryeni, AMS 19740527 200604 2 009	Sanitarian Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salimpaung
80.	Gita Rahma Yanti 19940819 202012 2 021	Apoteker Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Salimpaung

81. Ns. Nadhatun Nasyiah, S.Kep ...

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/444/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/378/BPKD-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41):

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 100.3.5.2/220/BKPSDM-2023, tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Afrizal, SE sebagai Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

2. Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900.1.3.6/607/Parpora-TD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan Dinas Parpora Th 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan perubahan sebagai berikut:

a. - memberhentikan Hendri Agung Indrianto, B. Mgt, MHSPS sebagai Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
   - mengangkat Afrizal, SE sebagai Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b. memberhentikan Afrizal, SE sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

c.mengubah ...

c. mengubah jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Efrison, S.Pd semula Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pariwisata menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat dan Bidang Pariwisata Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

d. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

e. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/444/BPKD-2023
TANGGAL 23 OKTOBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	AFRIZAL, SE 19670330 198903 1 005	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	EFRISON, SE 19720722 199403 1 005	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat dan Bidang Pariwisata
3.	RADIANUS, S.Pd 1982090921 200803 1 001	Kepala Bidang Keolahragaan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Olahraga
4.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Bendahara pada Subbag Keuangan	Bendahara Penerimaan
5.	HELMA YUNAMAULIDA PUTRI, A.Md 19970707 202203 2 005	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
6.	NUR ELYA INSANI, SE 19960612 2020012 2 019	Analis Ekonomi Kreatif	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
7.	RISKY TRI MENTARIE, A.Md 19930913 202012 2 015	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pariwisata
8.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Pembudayaan Olahraga	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/452/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan pengusulan perubahan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Pengelola Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/350/BPKD-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah nomor 900.1.7.1/1099/Setda-2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/9/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

a. – memberhentikan Rini Deswita sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
   – mengangkat Mariya Jumilda, ST sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

b. – memberhentikan Hendri Hasan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
   – mengangkat Rindi Pramadia Puspa, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

c.susunan ...

c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/452/BPKD-2023
TANGGAL 1 NOVEMBER 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/9/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si 19680803 198809 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	Dra. RENI SUSANTI 19720516 199203 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemeritahan
3.	ALINARDIUS, S.Ag, MA 19711215 199803 1 002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
5.	MASNI YULETRI, SE. MM 19760817 199701 2 001	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
6.	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT 19760820 200212 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
7.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	IRSYAD, S.Sos, M.AP 19691001 199307 1 001	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
9.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 002	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
10.	DEDI TRIWIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	WATMA YENTI 19821130 200701 2 003	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Penerima
13.	DESRIA IMELDA, SE 19841218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran

14. NENI YURITIKA ...

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
14	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	FEBY HIDAYAT, S.STP 19960630 201808 1 002	Analis Pemerintahan Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
16.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analis Bina Kehidupan Agama Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
18.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
19.	MARIYA JUMILDA, ST 19810326 201212 2 001	Penyusunan Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	DILLA GUSTIANA, A.Md 19880819 201101 2 007	Pengelola Keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
21.	RINDI PRAMADIA PUSPA, S.IP 19930111 202012 2 012	Analis Kinerja pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
22.	NURDARIMAS, S.SOS 19691221 199503 2 004	Analis Tata Usaha pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Penata Laporan Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/456/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/17/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/ 244/BKPSDM-2023, tanggal 3 November 2023 atas nama Adriyanti Rustam, SE, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/17/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Drs, Alfian Jamrah, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;dan

2. mengangkat Adriyanti Rustam, SE, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pengguna ....

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/456/BPKD-2023
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/17/BPKD-2023 PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ADRIYANTI RUSTAM, SE, M.Si 19710604 200501 2 008	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran
2.	ELVARINA, A.Md 19870118 201001 2 016	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/457/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/4/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/4/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/155/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/4/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/4/BKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 900/8740/Sekre-2023, tanggal 6 November 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/ 4.3.3/243/BKPSDM-2023, tanggal 3 November 2023 atas nama Inhendri Abas, S.Pd, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/4/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU :Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/4/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Riswandi, S.Pd, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   2. mengangkat Inhendri Abas, S.Pd, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. 1. memberhentikan Azizah, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   2. mengangkat Frandio Syahputra S.Pd sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c.Pengguna ...

c. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/457/BPKD-2023
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/4/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	INHENDRI ABAS, S.Pd. MM 19690620 199312 1 001	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran
2.	YETTY ASBEN, SE, M.Si 19691225 199003 2 003	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3.	LUTHFI, S.Pd 19690904 199109 1 001	Kepala Bidang Pembinaan SD	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SD
4.	EFRI DEDY, S.Pd, MM 19720423 200604 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan
5.	DEVIRA PURNAMA, SE 19750525 200701 2 014	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP
6.	FRANDIO SYAHPUTRA, S.Pd 19870503 201101 1 005	Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bendahara Pengeluaran
7.	FEBRIS JULINTA, A.Md 19830201 201001 2 025	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SD
8.	Dra. ERNITA, MM 19670609 199103 2 006	Analis Peserta Didik	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMP
9.	ADNI PABRI, SAP 19771221 200701 1 005	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Ketenagaan
10.	DARWILIS, S.Sos 19710123 199103 2 004	Pengelola Data Kurikulum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/458/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/40/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 900.1.7.1/ 618/Perkim dan LH -2023, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Usulan Perubahan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/40/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Syurganil Yusra sebagai Bendahara Penerimaan pada pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;dan

2. mengangkat Dea Rahayu Silviana, S,Si sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

b. susunan ....

b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/458/BPKD-2023
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/40/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. NOFI HENDRI, MT 19661115 199308 1 001	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran
2.	DEA RAHAYU SILVIANA, S.Si 19910828 201902 2 004	Analis Konservasi Kawasan	Bendahara Penerimaan
3.	AGUSTI, S.Pd 19810802 200901 2 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/459/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/444/BPKD-2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk keempat kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41):

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/ 2243/BKPSDM-2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah untuk keempat kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/22/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Afrizal, SE sebagai Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
   2. mengangkat Riswandi, S.Pd, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

c.susunan ...

c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/459/BPKD-2023
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/22/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RISWANDI, S.Pd, M.Pd 19660515 199003 1 009	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	EFRISON, SE 19720722 199403 1 005	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat dan Bidang Pariwisata
3.	RADIANUS, S.Pd 1982090921 200803 1 001	Kepala Bidang Keolahragaan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Olahraga
4.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Bendahara pada Subbag Keuangan	Bendahara Penerimaan
5.	HELMA YUNAMAULIDA PUTRI, A.Md 19970707 202203 2 005	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
6.	NUR ELYA INSANI, SE 19960612 2020012 2 019	Analis Ekonomi Kreatif	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
7.	RISKY TRI MENTARIE, A.Md 19930913 202012 2 015	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pariwisata
8.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Pembudayaan Olahraga	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/460/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/36/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Batipuh Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/ 246/BKPSDM-2023, tanggal 2 November 2023 atas nama Muhammad As'ad, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Camat Batipuh Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/36/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/36/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Benny Yohendri S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Batipuh Selatan;dan

   2. mengangkat Muhammad As'ad, S.Pd sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Batipuh Selatan;

b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Camat Batipuh Selatan;

c.susunan ...

c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/460/BPKD-2023
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/36/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN BATIPUH SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD AS'AD, S.Pd 19680331 200801 1 001	Plt. Camat Batipuh Selatan	Pengguna Anggaran
2.	OKY OKTAVIANUS, A.Md 19911013 202012 1 006	Verifikator Keuangan pada Kecamatan Batipuh Selatan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/548/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;

b. bahwa sehubungan pengusulan perubahan pengelola keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 954/225/BPKD-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900.1.3.5/967/PUPRP-2023, tanggal 20 November 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan TA 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/7/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/7/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Nofiarti sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan

2. mengangkat Yuni Fauziah Candes, A.Md.Ak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan

b.Susunan ...

b. Susunan lengkap pengelola keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/548/BPKD-2023
TANGGAL 30 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMROR 954/7/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	TEN FERI, ST, M.Si 19750210 200003 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
3.	ALHADI, S,ST, MT 19790912 200212 1 001	Kepala Bidang PSDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	BUJANG FIRDAUS 19730202 200604 1 011	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	YUNI FAUZIAH CANDES, A.Md.Ak 19950624 202203 2 002	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001